ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BANJAR BARAT KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP

COMMUNITY PARTICIPATION IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN BANJAR BARAT VILLAGE, GAPURA DISTRICT, SUMENEP DISTRICT

Oleh :
Cahyo Ari Purnomo[1)], Ida Syafriyani[2)]
[1)]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja [2)] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja
E-mail : cahyoaripurnomo2001@gmail.com [1]), Idafisipunija@gmail.com [2])

Abstract

Participation in planning is something that really determines the success of the development that will be implemented. However, it often still causes problems. From the research results, it was found that West Banjar Village community participation in participating in development planning meetings was still less active. The lack of active community participation in the planning stage is due to human resource factors, besides that they are busy with their work activities, the majority of whom are farmers. So when it comes to collecting and digging up information, they are usually less involved. This research aims to determine community participation in infrastructure development in West Banjar Village, Gapura District, Sumenep Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The focus of this research is participation in the planning stage, participation in the implementation stage, and participation in the utilization stage. Research data was obtained by researchers from observations, interviews and documentation. The research results show that: 1) Planning stage, at the planning stage community involvement in gathering information regarding identification of village problems and potential. Community involvement in participation was not born from the community's own initiative, but was due to several limitations they had, both limited human resources and economic limitations which tended not to think about village development information issues. 2) implementation stage, at this implementation stage the community has taken its role in implementing development such as bridge repairs, the community is more directly involved in the process of field activities compared to the deliberation process in the planning stage. 3) Utilization stage, at the utilization stage the results of a development project can be felt by the community. Completed development projects are used according to their function. A sense of responsibility is also instilled in caring for, maintaining and safeguarding the results of development projects that have been built.

Keywords: *Participation, Community, Village infrastructure development*

Abstrak

Partisipasi dalam perencanaan merupakan suatu hal yang sanggat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan di laksanakan. Namun, seringkali masih menimbulkan persoalan. Dari hasil penelitian ditemukan bentuk partisipasi masyarakat Desa Banjar Barat dalam mengikuti rapat perencananan pembangunan masih kurang aktif. Kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan karena faktor SDMnya, disamping itu disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya yang mayoritas sebagai petani. Jadi untuk urusan mengumpulkan dan menggalih informasi biasanya mereka kurang begitu terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan penelitian ini metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yakni partisipasi di dalam tahap perencanaan, partisipasi di dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi di dalam tahap pemanfaatan. Data hasil penelitian diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahap perencanaan, pada tahap perencanaan keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan informasi mengenai identifikasi masalah dan potensi desa. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi itu bukan lahir dari inisiatif masyarakat sendiri, tetapi dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan SDM maupun keterbatasan ekonomi yang cendrung tidak memikirkan persoalan-persoalan informasi pembangunan desa. 2) Tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan ini masyarakat sudah mengambil peranyanya dalam pelaksanaan pembangunan seperti perbaikan jembatan, masyarakat lebih ikut terlibat langsung proses kegiatan lapanagan dibandingkan proses musyawarah dalam tahap perencanaan. 3) Tahap pemanfaatan, pada tahap pemanfaatan hasil suatu proyek suatu pembangunan sudah dapat dirasakan bagi masyarakat. Proyek pembangunan yang telah selesai digunakan sesuai fungsinya. Rasa tanggung jawab juga ditanamkan tersendiri untuk merawat, memelihara dan menjaga hasil dari proyek pembangunan yang telah dibangun.
Kata kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan infrastruktur Desa

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa dilakukan untuk memberikan peningkatan kehidupan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Latif 2014).

Segala potensi yang ada di desa harus dikembangkan secara maksimal, baik dari potensi manusia maupun potensi alamnya agar pelaksanaan program pembangunan bisa tercapai. Hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan pembangunan dikatakan tepat sasaran apabila hasilnya bisa bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan kebutuhan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh (Ahmadi 2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Namun, dalam mewujudkan hal tersebur, diperlukannya partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas,dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

Menurut Sumaryadi pada (Riadi 2020) Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Riadi 2020). Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khsususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah di ujung timur pulau Madura juga menuai persoalan yang sama mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Sebab, musrenbangdes yang selama ini dilakukan setiap tahunnya belum mampu mengakomodir dan memerankan masyarakat lokal untuk ambil bagian didalamnya, sehingga muncul persepsi negatif bahwa musrenbangdes yang diselenggarakan hanya sebatas formalitas semata. Padahal dalam perencanaan pembangunan seharusnya masyarakat lokal memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan desa, misalnya dalam hal penggalian informasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang sumbernya dari masyarakat desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang masih diselaraskan antara kebijakan dari atas dan keinginan dari bawah, sehingga masyarakat rasa memilikinya terhadap hasil pembangunan rendah. Perencanaan pembangunan dibahas dan pelaksanaannya masih dilaksanakan pada tahun berikutnya. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga sehingga banyak dari hasil pembangunan tersebut kurang maksimal. Bentuk laporan pertanggungjawaban dari hasil tidak di pertanggungjawabkan kepada masyarakat secara langsung.

Berbicara mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, sama halnya yang terjadi

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

pada partisipasi masyarakat yang ada di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura. Dimana Partisipasi Masyarakat di Desa Banjar Barat dalam hal pengumpulan informasi masih kurang aktif, hal tersebut dikarenakan banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Masyarakat lebih aktif terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desanya, dibandingkan pada proses perencanaannya, apalagi dalam hal mengumpulkan informasi. Kurang aktifnya masyarakat dalam keterlibatan secara langsung pada proses penggalian informasi ini karena faktor SDM yang mereka memiliki, disamping itu juga karena mayoritas penduduk Desa Banjar Barat ini sebagai petani yang selalu disibukkan dengan aktifitasnya" (Ma'sum, kadus karamat).

Pelaksanaan musrembang di tingkat Desa, Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Masih kurang aktif. Hal itu yang perlu di tingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya, dari beberapa undangan yang hadir mayoritas terdiri dari perangkat desa dan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2019:8) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengelola *(manage)* keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan, menurut Rosenbloom (2005), mengatakan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Mardijono (2008 :19) dalam (Islami 2021) mengemukakan partispasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan (Islami 2021).

Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi 2007:27) adalah keikutsertaan

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dengan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Menurut Dewi, Fandeli dan Baiquni (2013) partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang di miliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Keputusan di dalam tahapan proses pembangunan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Di sini masyarakat tidak hanya penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Riadi 2020).

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundari Ningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: (1)Partisipasi langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. (2)Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya (Yunita 2016).

2.3 Teori Partisipasi

Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) yang sekaligus akan menjadi fokus dalam penelitian ini, mengemukakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terbagi atas 3 tahap, yaitu: (1)Partisipasi di dalam tahap perencanaan *(idea planing stage)* Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. (2)Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan *(implementation stage)* Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. (3)Partisipasi di dalam pemanfaatan *(utilitazion stage)* Partisipasi pada tahap

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat padatahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

2.4 Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Siagian dalam buku (Listyaningsih 2014:18) yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh. berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan. dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.

2.4.1 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Secara sederhana pembangunan mempunyai dua fungsi antara lain: 1. *The Development of Administration* yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan Administrasi Negara, yang meliputi: (a)Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan). (b)Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan). (c)Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tatalaksana termasuk prosedur dan tata kerja). 2. *The Administration of Development* yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi: (a)Administrasi dan perencanaan pemograman pembangunan (misalnya kemampuan dan mekanisme analisa dan pembentukkan kebijakan pembangunan, system perencanaan dan penganggaran). (b)Adminstrasi pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya untukberbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-beda sifatnya). (c)Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya. (d)Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan (Listyaningsih 2014:20).

2.4.2 Pengertian pembangunan Infrastruktur Desa

Pengertian pembangunan menurut Siagian 1994 pada (Digdowiseiso 2019:7) adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Digdowiseiso 2019:7). Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan (Sukirno 2006:53).

2.4.3 Tujuan Pembangunan Desa

Menurut Sudiharto Djiwandono dalam Nurman (2015:242) menjelaskan pembangunan desa memiliki beberapa tujuan yakni: 1.Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. 2. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa. 3. Tujuan kultural, dalam arti meningkatan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. 4. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode adalah kualitatif dengan jenis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012:04). Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mengumpulkan data yang erat hubungannya bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura dalam pembangunan infrastruktur, yang dapat digunakan sebagai *grand theory* atau teori untuk acuan dasar dalam menjawab rumusan masalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Partisipasi di dalam tahap perencanaan *(idea planing stage)*

Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*) yaitu Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek pembangunan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

Sebagai mana teori Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) sebelum melaksanakan pembangunan yang ada di desa, pemerintah desa Banjar Barat Kecamatan Gapura melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan desa, serta pembentukan tim penyusun kepanitiaan dan penyusunan anggaran. Musyawarah dilakaukan di tingkat dusun untuk mengumpulkan dan menerima usulan, saran dan kritik dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Setelah usulan dari setiap dusun tersebut tertampung, kemudian pemerintah menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan dijalankan sesuai dengan PAD. Apabila PAD banyak, dimungkinkan dijalankan program-program yang diusulkan masyarakat setelah di ketahui program yang akan di jalankan maka pemerintah desa meyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu dijalankan.

Hasil musyawarah di tingkat dusun selanjutnya dibahas dan diputuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah diselenggarakan oleh BPD dan pemerintah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa, yang dihadiri oleh perangakat desa, tokoh masyarakat, camat, BPD, serta masyarakat setempat. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan, kemudian Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan Musrembangdes.

Pemerintah Desa Banjar Barat sudah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan untuk melibatkan masyarakat dalam penggalian informasi menegenai potensi dan persoalan desa dengan cara mengadakan pertemuan melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat. Kegiatan itu pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan komitmen yang lebih luas dari para pihak yang ada di dusun/desa yang bersangkutan. Agar lebih mudah, dapat menggunakan kegiatan pertemuan-pertemuan yang memang sudah ada di Desa seperti musrembangdes, pertemuan rutin bulanan, arisan desa, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Dari itu diharapkan keterlibatan masyarakat akan semakin tinggi.

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

4.2 **Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan *(implementation stage)***

Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan *(implementation stage)* Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

Sebagai mana teori menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012: 8). Partisipasi Masyarakat di Desa Banjar Barat pada tahap pelaksanaan sudah mengambil perannya. Masyarakat ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dilapanagan terkait penentuan lokasi dalam proses pembangunan sampai pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga ikut memberikan ide/pemikiran berupa saran dan masukan terhadap kegiatan proyek pembangunan yang akan dibangun. Pada tahap pelaksanaan mereka lebih aktif, dibandingkan dengan partisipasi dalam tahap perencanaan. Mereka berinisiatif sendiri datang untuk membantu kegiatan-kegiatan pada tahap pelaksanaan suatu proyek pembangunan yang sedang dibangun, dengan system gotong royong. Masyarakat juga berpartisipasi dalam hal tenaga sesuai dengan kemampuannya masing-masing, terkait uang ataupun material/barang sudah jelas ada dari anggaran DD. Begitupun dengan alat-alat sudah di fasilitasi oleh Pemerintah desa. Pemerintah desa tidak ingin membebani lagi kepada masyarakat, hanya sebagian saja alat-alat yang dibawah oleh masyarkat pada saat pelaksanaan pembangunan.

4.3 Partisipasi di dalam pemanfaatan *(utilitazion stage)*

Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) Partisipasi di dalam pemanfaatan *(utilitazion stage)* Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Masyarakat Desa Banjar Barat berupaya menjaga agar manfaat dari adanya pembangunan yang telah selesai dibangun dapat dirasakan untuk bersama, dalam mewujudkan hal itu Masyarakat Desa Banjar Barat berpatisipasi dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan untuk menjaga dari kerusakan. Mereka memiliki rasa tanggung jawab tersendiri untuk merawat, memelihara dan menjaga hasil dari proyek pembangunan yang telah dibangun. Mereka berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan juga uang, untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang sudah dibangun. semisal ada

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

kerusakan pada pembangunan infrastruktur yang dibangun biasanya kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam pemeliharaan hasil pembangunan yang memperbaiki. Masyarakat disekitar pembanguan juga ikut berpartisipasi dalam hal ini. Mereka berinisiatif sendiri untuk ikut memperbaiki, artinya masyarakayat bukan hanya menjadi penikmat dari hasil pembangunan infrastruktur yang telah dibangun, akan tetapi masyarakat juga bertanggung jawab dalam hal merawat, memelihara dan menjaga hasil dari proyek pembangunan yang telah dibagun agar tidak terjadi kerusakan diwaktu yang singkat.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

(1)Partisipasi di dalam tahap perencanaan *(idea planing stage)* Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan informasi di dalam tahap perencanaan mengenai identifikasi masalah dan potensi desa. Hanya saja bentuk keterlibatan tersebut bukan partisipasi aktif, namun keterlibatan yang masih pasif. Artinya, partisipasi itu bukan lahir dari inisiatif masyarakat sendiri. Kurang aktifnya partisipasi masyarakat Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan Sumberdaya Manusia maupun keterbatasan ekonomi yang cendrung tidak memikirkan persoalan-persoalan informasi pembangunan desa. (2)Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan *(implementation stage).* Sementara partisipasi dalam tahap pelaksanaan, masyarakat sudah mengambil peranyanya dalam pelaksanaan pembangunan, mereka lebih aktif dibandingkan dengan partisipasi dalam tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan masyarakat ikut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dilapanagan terkait penentuan lokasi dalam proses pembangunan sampai pelaksanaan pembangunan. (3) Partisipasi di dalam pemanfaatan *(utilitazion stage).* Begitupun dalam partisipasi pada tahap pemanfaatan, masyarakat Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura dalam hal pemanfaatan hasil suatu proyek pembangunan juga dapat dikatakan suadah aktif. Mereka telah memanfaatkan pembangunan yang telah dibangun dengan sebagaimana mestinya, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab tersendiri untuk merawat, memelihara dan menjaga hasil dari proyek pembangunan yang telah dibangun agar tidak terjadi kerusakan diwaktu yang singkat.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni Perlu peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penggalian informasi mengenai potensi dan permasalahan desa melalui

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

pendekatan-pendekatan persuasif, serta memberikan peran pada kelompok masyarakat baik kepemudaan maupun kelompok perempuan sebagai tim penggalian data dan informasi. Sebaiknya perwakilan tokoh masyarakat setiap Dusun benar-benar selektif berdasarkan hasil musyawarah ditingkat Dusun, sehingga mampu menyampaikan dan mengawal setiap usulan-usulan yang telah disepakati ditingkat Dusun.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Digdowiseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. jakarta selatan: juli.

Ernawati, Purwaningsih. 2008. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Jantra* III,.

Isbandi, Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

Islami, Muhammad. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 (Studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang)." *Skripsi*.

Latif, Adam. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Moderat* 5:1–15.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi*. Yogyakara: graha ilmu.

Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunna Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Riadi, Muchlisin. 2020. "Partisipasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkatan Dan Faktor Yang Mempengaruhi)." *Januari 13*. Retrieved (https://www.kajianpustaka.com/2020/01/partisipasi-masyarakat.html).

Rulam. 2012. "Definisi Dan Teori Perencanaan." *June 18*. Retrieved (https://www.infodiknas.com/definisi-dan-teori-perencanaan.html).

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah Dan Dasar Kebijakan*. cetakan ke. Jakarta: Kencana.

Uu ri. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 8."

Uud.Ri. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1."

Uuri. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3."

Yunita. 2016. "Gerakan Makassar Tidak Rantasa." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* III(1):1–10.